

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang sudah dilaksanakan cukup baik namun masih ditemui beberapa hambatan-hambatan dan poin-poin penting yang perlu kembali diperhatikan dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang. Dalam sub bab ini, peneliti menyimpulkan berdasarkan fenomena penelitian yang terdiri dari beberapa variabel yang terdapat pada Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III. Adapun variabel yang dimaksud adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pertama, pada variabel komunikasi yang mencakup komunikasi antar stakeholders, komunikasi stakeholders dengan Tim KSB, komunikasi antar anggota Tim KSB, dan komunikasi Tim KSB dengan masyarakat tidak ditemukan adanya kendala yang berarti. Komunikasi dilakukan oleh seluruh pihak Sebagian besar adalah melalui Group WhatsApp. Berdasarkan wawancara dengan para informan, mereka justru merasa termudahkan dengan adanya teknologi ini karena penyampaian dan penerimaan pesan dianggap lebih efektif, efisien, dan effortless karena hanya dalam waktu yang sangat singkat seluruh pihak dapat menerima berita yang disampaikan. Hanya saja dalam keadaan tertentu yang bersifat darurat, Tim

KSB melakukan komunikasi dengan warga melalui alat komunikasi yang lebih umum dan bersifat massive seperti toa masjid dan musholla ataupun memanfaatkan kearifan lokal lainnya seperti kentongan atau tiang listrik. Komunikasi Tim KSB dengan masyarakat juga termasuk baik karena menurut hasil analisis kualitatif melalui kuesioner, masyarakat sudah memahami mengenai titik rawan bencana, jalur evakuasi terdekat, hingga langkah antisipasi yang harus dilakukan warga ketika bencana terjadi.

Kedua, pada variabel sumber daya meliputi dua jenis sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Pada sumber daya manusia, ancaman terbesar adalah kekhawatiran akan tidak terjadinya regenerasi anggota. Hal ini dikarenakan minat warga yang rendah untuk menjadi anggota Tim KSB. Namun hal tersebut tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada warga karena menjadi anggota Tim KSB ini adalah sifatnya sukarela (volunteer). Terlebih KSB ini adalah pekerjaan yang waktu kerjanya tidak terduga (unpredictable) yang mengharuskan untuk selalu siap siaga selama 24 jam sehari. Hal tersebut semakin diperparah dengan tingkat partisipatif anggota Tim KSB yang tergabung saat ini yang juga sangat rendah.

Ketiga, pada variabel disposisi yang mencakup feedback atau sikap dan tindakan timbal balik yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat. Pada implementasi kebijakan Kelurahan Siaga Bencana di Kelurahan Mangkang Wetan, dapat diketahui melalui wawancara dengan stakeholder maupun penyebaran kuesioner kepada masyarakat bahwa secara garis besar sikap yang ditunjukkan menunjukkan hasil yang baik karena seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik.

Namun karena variabel disposisi dan variabel sumber daya saling berpengaruh satu sama lain, menjadikan kendala yang dimiliki oleh variabel sumber daya juga menjadi kendala yang dihadapi oleh variabel disposisi yaitu rendahnya minat dan partisipasi warga untuk menjadi anggota Tim KSB. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat setempat belum sepenuhnya memberikan sikap timbal balik yang semestinya.

Keempat, pada variabel struktur birokrasi yang mencakup SOP dan pembagian job deskripsi, seluruh informan yang di wawancarai dalam penelitian ini secara serempak menyatakan bahwa SOP yang ada sudah jelas dan dapat dipahami dengan baik yang menandakan bahwa OPD yang terkait sudah memahami tugas masing-masing tanpa adanya tumpang tindih fungsi dan tugas.

#### **4.2 Saran**

Melalui kesimpulan yang telah dituliskan di atas, terdapat beberapa saran yang ditujukan bagi pihak terkait dalam Implementasi Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Mangkang Wetan Kota Semarang:

1. Tim KSB Kelurahan Mangkang Wetan hendaknya memiliki ruangan kantor sendiri sebagai pusat operasional Tim KSB Mangkang Wetan sebagaimana seharusnya seperti yang tercantum di dalam PERMENSOS No. 128 Tahun 2011.
2. Hendaknya Tim KSB, pihak kelurahan dan BPBD melakukan audiensi yang diadakan secara berkala sebagai wadah penyampaian aspirasi satu sama lain serta sebagai wadah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang

dihadapi di lapangan selama pelaksanaan kebijakan agar dapat melahirkan solusi bersama yang berguna untuk membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan.

3. Tim KSB hendaknya memiliki pakaian dinas harian (PDH) atau seragam yang dilengkapi dengan nama serta jabatan sebagai identitas keanggotaan. Hal ini dapat meningkatkan *awareness* warga terhadap kehadiran Tim KSB sehingga KSB dapat dikenal lebih luas oleh warga yang masih awam.
4. Untuk regenerasi anggota, alih-alih melalui aklamasi, kelurahan dapat bekerjasama dengan RT dan RW untuk menyebarkan selebaran berisi pencerdasan dan alur pendaftaran Tim KSB sehingga masyarakat juga dapat mengenal dan mengetahui hal tersebut dengan lebih baik.
5. Fasilitas yang ada hendaknya ditambah dan dipantau oleh BPBD minimal satu tahun sekali untuk menghindari adanya kekurangan fasilitas yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
6. Tim KSB, kelurahan, dan RTRW juga hendaknya memiliki forum public hearing untuk mengetahui kondisi dan keluhan warga sekitar selama terjadi bencana. Hal ini dapat mempermudah pemetaan permasalahan serta solusinya.
7. Pengurus RT dan RW yang sering terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan, terutama ketika terjadi bencana, juga hendaknya dibekali dengan kemampuan tindak kesiapsiagaan melalui pelatihan yang diadakan oleh BPBD bersamaan dengan pelatihan yang diberikan kepada Tim KSB sehingga dapat menanggulangi bencana dengan lebih baik dan benar.

8. Menambah marka jalur evakuasi di berbagai titik rawan bencana untuk memudahkan warga dalam menyelamatkan diri ketika bencana terjadi.